

Optimalisasi Tata Kelola Kesehatan Melalui Pendampingan Strategis di Kabupaten Bombana

Ayun Sriatmi¹, Novia Handayani², Dion Zein Nuridzin³, Rani Tiyas Budiyaniti^{4*}, Nurhasmadiar Nandini⁵, Nikie Astorina Yunita Dewanti⁶,
^{1,2,3,4,5} Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
*Corresponding author : ranitiyas@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Bombana memiliki skor Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,5659 dan merupakan peringkat ke-13 dari 17 Kota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data realisasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022, hampir seluruh layanan kesehatan dasar belum mencapai 100%. Memperhatikan hal di atas, maka perlu dilakukan pendampingan pada Kabupaten Bombana. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu advokasi awal, analisis situasi, review renja dan sosialisasi program prioritas kesehatan, orientasi multipihak, finalisasi dan sosialisasi dokumen renja, serta advokasi akhir. Kegiatan pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 telah mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang kesehatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti. Pendampingan ini membantu Kabupaten Bombana dalam menyusun Renja yang selaras dengan target nasional, provinsi, dan daerah, sehingga dapat menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan kesehatan serta mendukung advokasi kepada stakeholder lintas sektor.

Kata Kunci: tata kelola kesehatan, pendampingan strategis, standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan

ABSTRACT

Bombana Regency has a Community Health Development Index (IPKM) score of 0.5659 and is ranked 13th out of 17 cities and districts in Southeast Sulawesi Province. Based on data on the realization of the achievement of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector in 2022, almost all basic health services have not reached 100%. Considering the above, it is necessary to assist in Bombana Regency. This assistance activity is carried out through several stages, namely initial advocacy, situation analysis, review of the work plan and socialization of priority health programs, multi-party orientation, finalization and socialization of the work plan document, and final advocacy. The assistance activity for the Governance of the Bombana Regency Health Program in 2024 has supported the preparation of a more systematic, integrated, and evidence-based Work Plan (Renja) document in the health sector. This assistance assists Bombana Regency in compiling a Work Plan that is in line with national, provincial, and regional targets so that it can be a strategic reference in health development planning and support advocacy to cross-sector stakeholders.

Keywords: health governance, strategic assistance, minimum service standards (SPM) for health

PENDAHULUAN

Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018, skor Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,5659 dan merupakan peringkat ke-13 dari 17 Kota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun skor IPKM tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2013 yaitu

dari 0,4772 pada tahun 2013 menjadi 0,5659 pada tahun 2018, namun Kabupaten Bombana masih menempati peringkat ke 375 dari 416 Kabupaten di tingkat nasional^{[1], [2]}.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terdapat 30 indeks yang menggambarkan kesehatan masyarakat di setiap kabupaten/kota di Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat^[3]. Nilai IPKM diantaranya terdiri dari berbagai bagian yaitu kelompok kesehatan reproduksi, balita, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan untuk mengetahui kesejahteraan kesehatan antar daerah.^[4]

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2022, Angka Harapan Hidup terus meningkat sejak tahun 2018 hingga 2022 yaitu 68,17 pada 2018 menjadi 69,2 pada

2022. Namun demikian, kualitas kesehatan masyarakat masih menjadi sorotan [5].

Berdasarkan data realisasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022, hampir seluruh layanan kesehatan dasar belum mencapai 100%. Hanya 1 dari 12 jenis layanan saja yang telah mencapai 100% yaitu pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian SPM seharusnya 100%. [6], [7].

Kecenderungan permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular mengalami peningkatan di Kabupaten Bombana, seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, TBC, ISPA, dan lainnya. Hal tersebut akan menyebabkan kualitas kesehatan selama hidup menurun serta menimbulkan beban bagi pembiayaan kesehatan. Selain itu, terdapat 10 penyakit terbesar di Kabupaten Bombana yaitu ISPA, hipertensi, tukak lambung, penyakit kulit alergi, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, diare, penyakit kulit infeksi, Diabetes Mellitus, karies gigi, dan kecelakaan ruda paksa [2], [3].

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan kesehatan, dipandang perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bombana. Perencanaan yang disusun dengan baik dan benar bisa disamakan dengan 70% pekerjaan telah terselesaikan. Sebaliknya jika perencanaan disusun dengan tidak tepat maka sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan.

Dalam hal perencanaan, sinergitas berbagai aspek dan keterkaitan multisektor terkait diperlukan. Memperhatikan hal di atas, maka perlu dilakukan pendampingan pada Kabupaten Bombana dengan memperhatikan 5 aspek dalam penentuan prioritas masalah kesehatan. Selain itu, keterlibatan multisektor diperlukan dalam penguatan perencanaan di bidang kesehatan terutama terkait dengan isu strategis daerah.

Melalui pendampingan ini diharapkan kualitas perencanaan Kabupaten Bombana menjadi lebih baik dan disusun berdasarkan *evidence based*, holistik, komprehensif, dan terintegratif yang akan membawa dampak positif terhadap pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, diharapkan kapasitas Dinas Kesehatan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan manajemen pelayanan kesehatan meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan status kesehatan antar kabupaten.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan terdiri dari beberapa tahapan:

1. **Advokasi Awal**
Kegiatan advokasi merupakan suatu upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini tujuan dari kegiatan advokasi dilakukan untuk memperoleh dukungan dan komitmen terkait kesehatan dari pemangku kebijakan dan stakeholder terkait. Advokasi dilakukan kepada Bupati Bombana, Bappeda Kabupaten Bombana, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.
2. **Analisis Situasi**
Pada tahap analisis situasi dilakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan kesehatan di Kabupaten Bombana yang akan menjadi prioritas untuk diintervensi. . Dalam tahapan ini akan dikaji lebih mendalam data kesehatan dari tahun sebelumnya, dan menilik kembali Renja tahun 2024.
3. **Review Renja dan Sinkronisasi Program Prioritas Kesehatan**
Pada tahap ini dilakukan analisis dan kajian lebih lanjut mengenai masalah kesehatan yang menjadi prioritas, penyebab permasalahan, strategi intervensi dan penganggaran yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan pada tahun 2025. Selain itu juga akan dilakukan sinkronisasi program prioritas kesehatan dengan isu strategis nasional, isu strategis daerah, RPD dan renstra dinas kesehatan.
4. **Orientasi Multipihak**
Dalam strategi penanganan masalah kesehatan prioritas terutama terkait isu strategis daerah diperlukan koordinasi penanganan lintas sektor dengan OPD lain. Dukungan, komitmen, pencapaian strategi yang ditetapkan, perencanaan dan penganggaran dapat dikaji lebih lanjut melalui pertemuan lintas sektor terkait.
5. **Finalisasi dan Sosialisasi Dokumen Renja**
Pada tahap ini dilakukan finalisasi dokumen Renja 2025 dengan melakukan kaji ulang permasalahan prioitas kesehatan, penyebab

permasalahan, strategi intervensi, dan penganggaran yang telah disusun. Selain itu, juga akan dilakukan pelatihan terkait teknik advokasi kesehatan agar tim Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan lobbying, negosiasi, dan metode advokasi lainnya pada pimpinan daerah. Sosialisasi renja bertujuan untuk memperoleh dukungan terhadap sasaran agar tujuan program atau strategi yang telah ditetapkan dalam Renja dapat tercapai.

6. Advokasi akhir

Advokasi akhir dilakukan kepada PJ Bupati Kabupaten Bombana mengenai permasalahan dan program kesehatan yang menjadi prioritas dan memerlukan dukungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Advokasi Awal

Pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan advokasi awal yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Bombana. Pertemuan ini dihadiri oleh PJ Bupati.

Ketua tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan. Selain itu, beliau juga menyampaikan terkait alasan yang mendasari pemilihan Kabupaten Bombana pada kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2024 ini. Rencana kegiatan selama beberapa bulan ke depan juga disampaikan seperti analisis situasi hingga finalisasi dokumen serta sosialisasi dokumen renja.

Dalam pelaksanaannya, advokasi juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan, terutama terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).^[8]



Gambar 1. Advokasi kepada PJ Bupati Kabupaten Bombana

2. Analisis Situasi

Pada pertemuan analisis situasi dilakukan secara daring. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan permasalahan yang menjadi dasar mengapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dapat tercapai diantaranya adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan imunisasi TT, jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian 12 layanan dasar kesehatan seharusnya 100%. Hal tersebut harus dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan atas hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh layanan dasar kesehatan [9].

Pada pertemuan ini juga digali lebih lanjut penyebab permasalahan yang terjadi untuk kemudian dipetakan alternatif solusinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian masalah dalam sebuah *problem solving cycle*.^[10]



Gambar 2. Pelaksanaan analisis situasi

3. Review Renja dan Sinkronisasi Program Prioritas Kesehatan

Pada tanggal 15-16 Juli 2024 telah dilakukan kegiatan review renja dan sinkronisasi program prioritas kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Pada tahap ini dilakukan review dan pemberian masukan terhadap Renja yang telah disusun oleh Kabupaten Bombana. Selain itu juga dilakukan sinkronisasi program prioritas kesehatan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu diskusi dalam kegiatan ini adalah penguatan strategi akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, dan penguatan pengelolaan kesehatan ibu dan anak sesuai standar serta penajaman intervensi stunting secara terintegrasi.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas program di Indonesia dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. ^[11]



Gambar 3. Pelaksanaan review renja dan sinkronisasi program kesehatan

4. Orientasi Multipihak

Tahapan kegiatan orientasi multipihak dilakukan pada hari Senin dan Selasa, 9 dan 10 September 2024 di Aula Bappeda Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dukungan, komitmen lintas sektor dalam pencapaian strategi perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan.

Kegiatan diikuti oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perkim dan Pertanahan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dan perwakilan 5 kecamatan, 5 kelurahan dan 5 desa terpilih di Kabupaten Bombana.

Dalam kegiatan ini dilakukan pemaparan materi kesehatan dalam program kerja Kabupaten Bombana oleh Bappeda dan penyampaian draft Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Bombana, sesi ini dilanjutkan dengan diskusi.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pada tahap ini adalah dukungan stakeholder pada beberapa program kesehatan di Kabupaten Bombana. Selain itu, terdapat beberapa fokus program yang dilakukan seperti perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan, peningkatan advokasi dan koordinasi lintas sektor, penyusunan target sasaran SPM sesuai data riil, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dukungan lintas sektor diperlukan dalam pelaksanaan program secara komprehensif seperti salah satu contohnya adalah program penurunan stunting. Kerjasama lintas sektor dalam suatu aksi konvergensi dapat mendukung ketercapaian tujuan program dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program. ^[12]



Gambar 4. Pelaksanaan orientasi multipihak

5. Finalisasi Dokumen Renja dan Sosialisasi Renja

Pasca orientasi multipihak, dilakukan pendampingan finalisasi dokumen renja dan sosialisasi dokumen renja kepada stakeholder terkait pada tanggal 21 Oktober 2024 hingga 22 Oktober 2024 .

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan finalisasi Renja dan mensosialisasikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana kepada lintas sektor dan stakeholder terkait serta dalam rangka penguatan dukungan dan peran serta lintas sektor dalam menyikapi isu-isu kesehatan di Kabupaten Bombana.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermasdes), Disdukcapil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Organisasi Profesi, Puskesmas, Rumah Sakit, Organisasi profesi di Kabupaten Bombana, Kecamatan, Kelurahan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini juga disampaikan bahwa peran serta dan dukungan lintas sektor sangat diperlukan terutama dalam ketercapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.



Gambar 5. Pelaksanaan sosialisasi

6. Advokasi Akhir

Tahapan advokasi dilakukan kepada PJ Bupati Kab. Bombana untuk menyampaikan hasil kegiatan beserta rekomendasi untuk upaya tindak lanjutnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 di Rumah Jabatan Bupati Bombana. Pada kegiatan advokasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kabupaten Bombana.

Sebagai upaya tindak lanjut, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Bombana perlu melakukan koordinasi yang efektif secara berkesinambungan untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang muncul, serta selalu melibatkan

stakeholder lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bombana.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) bidang kesehatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti. Pendampingan ini membantu Kabupaten Bombana dalam menyusun Renja yang selaras dengan target nasional, provinsi, dan daerah, sehingga dapat menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan kesehatan serta mendukung advokasi kepada stakeholder lintas sektor. Pendampingan ini juga turut memperkuat kemampuan Kabupaten Bombana dalam mengidentifikasi dan menetapkan permasalahan kesehatan prioritas yang perlu segera ditangani, serta merumuskan kegiatan kesehatan yang relevan. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, juga terpetakan dengan baik, memperkuat koordinasi guna mencapai target kesehatan daerah. Dengan demikian, hasil pendampingan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Bombana, mendukung pencapaian target kesehatan yang terukur dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Kementerian Kesehatan Indonesia.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada PJ Bupati Kabupaten Bombana, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan stakeholder di wilayah Kabupaten Bombana atas kerjasama yang dilakukan selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018.

https://labkesmaspangandaran.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=3652&keywords=

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Profil Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2021
3. Hidayangsih PS, Hapsari D, Ma'ruf NA. Formulation of Indonesian public health development index. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. 2011;14(2):21264.
4. Alhaqni ZP, Auliadin A, Rasmuri P, Setiabudi DI, Iswandi I. Analisis Implementasi Program Posyandu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gantar Dusun Wagir. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*. 2022 Sep 5;2(3):69
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2022
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
8. Jati, S. P., Budiyo, B., Budiyantri, R. T., Handayani, N., Dewanti, N. A. Y., & Nandini, N. (2023). Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Jepara. *Journal of Public Health and Community Service*, 2(2), 61-67.
9. Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 175-185.
10. Habiburrahman, M., & Putra, A. B. (2024). Evaluating primary care programmes: a problem-solving cycle with literature review on programme evaluation for cervical cancer screening at a community health centre, Jakarta, Indonesia. *Family Medicine & Primary Care Review*, 26(1).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Hakim, R. (2024). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Capaian Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Dalam Rangka Menurunkan Angka Stunting Tahun 2023 Di Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 9(1), 1-13.